

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Hakim, 2011 *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2012, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59
- Johan Cahya Kusuma, *Hak Imunitas Anggota Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Lahirnya Undang-undang MD*, Skripsi, UMS, hlm. 11
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Nuansa, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Pasca Reformasi, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung.
- Marwan Effendy, 2010, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ni"matul Huda, 2014, *Ilmu negara*, cetakan ke-6, Depok: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Semarang, PT. Citra Adytia Bhakti, Jakarta, hlm. 53

Syaiful Bakhri, 2010, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta.

Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Paca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018

C. JURNAL/INTERNET

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,: UII Press, Yogyakarta.

Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), di akses tanggal 16 April 2021

Eko Yulianto, Bruce Anzward, Suhadi, 2019, *Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2019

Farahdiba Rahma Bcahtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profektif, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2014.

Lihat Majda El-Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Cet 5, Jakarta,

Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Volume.I, Nomor.1,2013.

Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Universitas Brawijaya.)

Supriyadi A Arief, *Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law*, Jurnal, volume 1, Tahun 2019

Andri Saubani <https://republika.co.id/berita/p42zp9409/protes-hak-imunitas-anggota-dpr-wakil-ketua-kpk-siap-mundur>. Diakses pada 20 agustus 2020

Arif Ikhsanudin <https://news.detik.com/berita/d-3737268/kasus-viktor-dihentikan-pan-sindir-hak-imunitas-anggota-dpr>. Diakses pada 20 Agustus 2020

<https://www.kompasiana.com/zaenabafaf/59a7623bdbbea40ef75b5632/pengertian-fungsi-dan-hak-hak-dpr?page=all>. Diakses pada 20 Agustus 2020